

Minimalisasi Ruang Intervensi Kekuatan Bisnis Retail Indomaret terhadap Pembangunan Desa Arjowilangun, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Minimization of Intervention Space of Indomaret Retail Business Force towards the Development of Arjowilangun Village, Malang Regency, East Java

Ira Permata Sari^{1*}

¹*Research Centre of Politics and Government (PolGov), Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustici Bulaksumur, Lantai 4 Gedung B, Yogyakarta 55281, Indonesia;*

**Penulis Korespondensi. e-mail: iraa.permata92@yahoo.co.id
(Diterima: 29 Maret 2018; Disetujui: 23 Agustus 2018)*

ABSTRACT

Intervention of market forces, such as Indomaret retail business, becomes a mainstream and given space as a major force by the government in development in Indonesia. In practice, various government policies places intervention of market forces as driving actors for the political, economic, social, and cultural transformation. Using the case of Indomaret's rejection in Arjowilangun Village, Malang Regency in 2015 and using qualitative research study, this paper explains how villagers do not give space for market in the village development process. From this study, intervention of market forces that had been the mainstream of government policy in development is not placed by villagers as the only force able to carry out development in the village. This situation is due to the collision between market forces that come from outside with the economic power of the villagers that not only change the economy, society, and culture of the village, but also influence the political transformation of the village. Thus, when market forces tried to intervene village development, they have to face the major force of the village that have been built slowly since the village experienced economic slump in the 1970s.

Keywords: Arjowilangun village, identity discourse, market intervention, neoliberalism

ABSTRAK

Intervensi kekuatan pasar, seperti bisnis retail Indomaret, menjadi arus utama yang diketengahkan untuk diberi ruang sebagai kekuatan mayor oleh pemerintah dalam pembangunan di Indonesia. Dalam praktek, berbagai kebijakan pemerintah menempatkan intervensi kekuatan pasar sebagai aktor penggerak transformasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan menggunakan kasus penolakan Indomaret di Desa Arjowilangun, Kabupaten Malang, tahun 2015 dan menggunakan studi penelitian kualitatif, tulisan ini menjelaskan bagaimana warga desa tidak memberikan ruang untuk pasar dalam proses pembangunan desa. Dari studi ini, intervensi kekuatan pasar yang selama ini menjadi arus utama kebijakan pemerintah dalam pembangunan tidak ditempatkan oleh warga desa sebagai kekuatan yang satu-satunya bisa melakukan pembangunan di desa. Situasi ini disebabkan terbenturnya kekuatan pasar yang bersifat pendatang dengan kekuatan ekonomi warga desa yang tidak hanya merubah perekonomian, sosial, dan budaya desa tetapi sampai memberikan pengaruh pada transformasi politik di desa. Sehingga, ketika kekuatan pasar mencoba mengintervensi pembangunan desa, ia harus berhadapan dengan kekuatan mayor di desa

tersebut yang telah terbangun lama secara perlahan sejak Desa Arjowilangun mengalami keterpurukan ekonomi di tahun 1970-an.

Kata kunci: Desa Arjowilangun, intervensi pasar, neoliberalisme, wacana identitas

PENDAHULUAN

Ketertarikan pemerintah terhadap kekuatan ekonomi lain (aktor pasar) untuk menyegerakan pembangunan di perdesaan begitu mengemuka. Studi Loekman Soetrisno tahun 1995 misalnya memotret kecenderungan tersebut. Menurutnya, pemerintah berusaha untuk memasukkan usaha industrialisasi melalui kekuatan ekonomi lain di perdesaan-perdesaan untuk mendirikan sesuatu industri secara fisik pada kehidupan warga. Industrialisasi menjadi tujuan akhir dari proses pembangunan perdesaan di Indonesia termasuk negara berkembang lainnya (Soetrisno, 1995).

Beberapa kajian mengonfirmasi adanya praktik intervensi kekuatan pasar sebagai wujud penerapan model pembangunan neoliberalisme di Indonesia (Musyaddad, 2003; Winarno, 2013; Soedjais, 2003). Perlawanan para penggiat usaha Stasiun Pos Duri sebagai salah satu contoh empiris kuatnya intervensi pasar terhadap pemerintah. Pada kasus tersebut, PT. KAI melakukan penggusuran terhadap usaha-usaha yang ada di Pos Duri, kecuali ritel seperti Alfamart dan Indomaret. Padahal lokasi berdirinya bisnis ritel Indomaret dan Alfamart berdampingan dengan tempat bisnis para penggiat usaha Stasiun Pos Duri (Ananta, 2014). Kecenderungan kuatnya intervensi pasar terhadap pemerintah misalnya tercermin dari semakin bertambahnya jumlah bisnis ritel Indomaret ataupun Alfamart sebagai aktualisasi aktor pasar. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Malang, misalnya menunjukkan kecenderungan kuatnya intervensi pasar.

Tabel 1 Perkembangan jumlah bisnis ritel modern di Kabupaten Malang

Tahun	Alfamart	Indomaret
2011	37	54
2014	65	78

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang (disperindag.malangkab.go.id)

Posisi negara dalam pembangunan ekonomi dari perspektif neoliberalisme, negara ditempatkan hanya sebagai peluang politik untuk memastikan proses-proses ekonomi yang diciptakan, berjalan sesuai dengan tujuan. Paham neoliberalisme melihat proses ekonomi sudah terlampaui jauh diintervensi oleh politik (baca: negara). Baginya, justru peran negara yang terlalu kuat akan merusak proses-proses ekonomi dan merugikan warga (Winanti, 2011). Praktik neoliberalisme, salah satunya terpotret dari studi Loekman Soetrisno, dimana pemerintah Indonesia bersemangat untuk menaruh kekuatan ekonomi lain (aktor pasar) untuk menyegerakan pembangunan di perdesaan dan memberikan keuntungan kepada warga.

Neoliberalisme mengandaikan proses ekonomi hanya memerlukan campur tangan sedikit dari politik, yakni sebagai penjamin iklim untuk perusahaan, dan bisnis bekerja. Dalam definisi David Harvey perusahaan dan bisnis adalah kelompok pasar (Harvey, 2005).

Cara kerja pasar dalam konsep neoliberalisme tidak hanya berkolaborasi dengan negara, tetapi juga memiliki kekuasaan untuk ikut masuk dalam ranah politik seperti menuliskan peraturan, menentukan kebijakan, mengatur kerangka peraturan “terutama yang menguntungkan mereka sendiri” (Harvey, 2005).

Sehingga, saat terjadi intervensi pasar dalam proses perekonomian sebuah wilayah tidak terlepas pula dari aktivitas pasar dalam ranah politik. Kajian Sofyan S. Harahap dan Fahru Nofrian dalam Fadjar (2010) memotret adanya kedekatan pasar dan politik dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Pasar yang menjadi aktor solutif model pembangunan ekonomi Indonesia menegaskan bahwa pasar telah menghegemoni proses-proses politik khususnya dalam hal ini kaitannya dengan kebijakan politik di bidang ekonomi. Intervensi pasar menjadi wacana yang menghegemoni.

Menurut Gramsci yang diacu dalam Methmann (2010), hegemoni itu sendiri adalah bentuk moral dan kepemimpinan intelektual yang mendukung hubungan yang ada dominasi dalam dunia politik. Sedangkan, wacana yang mengakar dan menjadi dominan adalah hasil dari proses mempertahankan eksistensi wacana (Methmann, 2010). Untuk menjadi dominan dalam proses-proses politik jalan yang perlu dilalui adalah pertarungan-pertarungan wacana. Mengutip dari Savirani (2017), wacana itu sendiri diartikan dengan artikulasi atau berargumen. Artikulasi adalah “kegiatan/praktik apa pun yang membangun relasi di antara elemen, termasuk identitas, yang merupakan hasil dari modifikasi kegiatan berwacana/berartikulasi” (*any practices establishing a relation among elements such as their identity, which is modified as a result of the articulatory practices*).

Tulisan ini bertujuan menanyakan tentang *discourse* intervensi kekuatan pasar untuk transformasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di sebuah wilayah. Pasar seolah telah menghegemoni negara dalam mengeluarkan kebijakan. Penolakan pasar (bisnis ritel Indomaret) menjadi titik masuk mencari jawaban tersebut. Penolakan pasar yang terjadi di Desa Arjowilangun dalam tulisan ini dibaca dengan menggunakan perspektif neoliberalisme dan teori wacana (*discourse theory*). Tulisan ini mendalami bagaimana intervensi kekuatan pasar dalam proses-proses pembangunan ekonomi sebuah wilayah perdesaan bertemu

dengan kekuatan-kekuatan mayor yang sudah sejak lama terbangun di Desa Arjowilangun.

METODOLOGI

Sebagai upaya untuk mencari jawaban pertanyaan studi ini menggunakan metode dengan corak penelitian kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus menurut Creswell (2007) yakni sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menginvestigasi dan menggali sebuah atau beberapa kasus secara utuh (*bounded*) dengan rentang waktu yang khusus atau spesifik, dilakukan secara detail, penggalan data secara mendalam dari berbagai sumber informasi (observasi, wawancara, rekaman suara dan gambar, dokumen, dan laporan yang mendeskripsikan atau menginformasikan topik tertentu yang dipilih dalam studi ini). Penelitian kualitatif dalam studi ini secara khusus menggunakan metode studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*). Pilihan menggunakan metode tersebut disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendapatkan kedalaman temuan dan keunikan dari kasus intervensi kekuatan bisnis retail Indomaret di Desa Arjowilangun.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Arjowilangun, Indonesia dengan momentum kasus penolakan Indomaret yang pernah terjadi di pertengahan tahun 2015. Alasan memilih Arjowilangun sebagai lokasi penelitian dikarenakan studi ini merupakan studi yang ingin melihat perkembangan rantai intervensi kekuatan pasar yang selama ini di Indonesia dijadikan prioritas sebagai kekuatan mayor untuk dihadirkan sebagai aktor solutif pembangunan yang mana diuji coba pada wilayah yang sudah kuat secara ekonomi. Arjowilangun memenuhi kriteria wilayah yang penulis butuhkan, dan secara makro Kabupaten Malang sebagai ibu dari Desa Arjowilangun memiliki kemauan politik yang keras untuk membawa intervensi kekuatan pasar dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Malang,

dari kota sampai desa (Lukito, 2016; Anjar, 2016).

Teknik Pengumpulan Data

Dengan kerangka pendekatan dan metode penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Desk-study

Desk study dilakukan untuk melacak dan memetakan hasil penelitian terdahulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan kajian terhadap fokus yang penulis ambil. Pemetaan ini berupa buku, jurnal, dokumen resmi pemerintah, laporan penelitian, berita-berita koran lokal maupun nasional ataupun tulisan-tulisan lepas.

2. Observasi

Teknik ini digunakan untuk menumbuhkan *sense of condition* penulis. Selain itu teknik ini dimanfaatkan untuk menemukan narasumber selanjutnya kepada narasumber yang sedang diwawancarai (*snowball sampling*).

3. In-depth interview

Untuk *field study* dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) pada aktor kunci yang terlibat dalam perlawanan yaitu pelaku ekonomi desa yang memiliki toko ritel, pemerintah desa.

Alur Aktivitas Penelitian

Tahap 1: Pra Penelitian

Sebelum turun melakukan penelitian lapangan di Desa Arjowilangun, Kabupaten Malang, Jawa Timur, penulis mengumpulkan data awal tentang kasus penolakan toko modern di Kabupaten Malang sebagai representasi intervensi kekuatan pasar. Selain itu, penulis melakukan *literature review* tentang kajian-kajian penolakan terhadap intervensi pasar khususnya spesifik kasus penolakan toko modern. Di samping melakukan *desk study* dan melakukan pengumpulan data pendukung, penulis mempersiapkan instrumen penelitian yang berisi *guiding information* untuk panduan penelitian lapangan.

Tahap 2: Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode observasi dan wawancara mendalam dengan narasumber kunci dengan teknik *snowball sampling* ini dilaksanakan September sampai dengan pertengahan Oktober 2016. Penelitian lapangan ini dipandu dengan data yang sudah didapatkan dari *pre-field research*.

Tahap 3: Aktivitas Paska Penelitian Lapangan

Penelitian yang sudah dilakukan pada penelitian lapangan (*field research*) dicatat dan setelah itu dilakukan transkrip atas hasil *field research*. Untuk memperdalam hasil temuan lapangan, penulis mengikuti seminar yang berkaitan dengan kasus yang penulis gunakan. Selanjutnya dalam penulisan draf laporan dilakukan kegiatan *brainstorming* dengan dosen pembimbing tesis.

HASIL DAN DISKUSI

Bussines Oriented: Peralihan Napas Perekonomian Arjowilangun

Selama ini warga di perdesaan sering dikenal dengan identitas yang aktivitas sehari-harinya tergantung dari sumber daya alam (Nuryanto, 2011). Cukup berbeda halnya yang terjadi di Desa Arjowilangun. Desa ini justru sebagian besar hampir meninggalkan ketergantungannya dengan sumber daya alam, seperti hasil pertanian dan beralih ke bidang perdagangan dan industri-industri rumahan. Peralihan ini tidak lain karena traumatis terhadap pengolahan sawah di desa tersebut.

Pengalaman Arjowilangun dalam mengolah lahan sawah, hasil yang diperoleh dinilai tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup warganya. Tidak optimalnya hasil pertanian disebabkan lahan di Arjowilangun hanya menggunakan metode pengairan tadah hujan, yang pada akhirnya membuat perekonomian desa terpuruk tahun 1970-an¹.

¹ Malang-Post, edisi 25 Mei 2015; Intisari-online, edisi 21 Oktober 2013; news.detik.com, edisi 24 juni 2011.

Aktivitas perekonomian desa mulai menggeliat naik sejak warga desa tahun 1998 memilih bekerja menjadi buruh migran, dan kembalinya dari negara rantauan, membangun usaha-usaha pertokoan ritel mulai dari pakaian, kebutuhan sehari-hari, *handphone*, bengkel, peralatan rumah tangga, membuka *counter* pulsa dan sebagainya. Usaha toko ritel bukan menjadi pilihan berwirausaha mantan buruh migran saja, melainkan sudah menjadi pilihan sebagian warga Desa Arjowilangun sejak terjadi keterpurukan ekonomi desa akibat menggantungkan dengan hasil pertanian. Dengan banyaknya usaha-usaha yang berkembang di desa, desa ini selama lima tahun menjadi laboratorium Kementerian Dalam Negeri dalam bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan perangkat desa. Dampaknya desa ini sering dikunjungi oleh pemerintah dari luar Jawa, sehingga bukan lagi sebuah desa yang lusuh dan sepi tamu.

Kegiatan bersih desa yang dilakukan setahun sekali, dikonsep megah, menggunakan dana yang fantastis mengundang banyak pedagang musiman berjualan. Warga desa sangat terbuka dengan kehadiran warga luar desa, sepanjang seperti pelaku usaha diluar warga Desa Arjowilangun tidak menetap mendirikan usaha di desa². Identitas sosial menjadi syarat mutlak untuk ikut dalam proses perekonomian desa.

Warga Desa Arjowilangun dikenal loyal dengan kegiatan-kegiatan desa, membangun jalan desa, menyediakan fasilitas ronda, membangun rumah warga. Tidak hanya itu di desa ini juga dikenal adanya istilah “tanah cari uang” (Toyamah, 2010). Warga desa ini dikenal memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi terutama dalam beli tanah, harga jual tanah di desa ini sangat tinggi. Selain istilah tanah cari uang warga desa ini dikenal sebagai orang “magak”. Magak adalah istilah Jawa. Orang magak berarti jika ditempatkan di kota, bisa beradaptasi, jika di tempatkan di desa memiliki keinginan bergaya hidup kota (*Magak maksute*

diseleh kutho kenek, diseleh desa kudu neng kuto ngunu).

Tidak hanya mampu dalam urusan membeli tanah, tetapi juga dalam memenuhi gaya hidup. Pasar (Indomaret) yang ada di Kecamatan Pucung, bahkan diakui oleh para pembeli dipenuhi dari warga Desa Arjowilangun. Budaya konsumtif ini juga tidak bisa dilepaskan dari kemampuan ekonomi dan kebiasaan mereka bersinggungan dengan dunia global, yang serba modern.

Penjajakan oleh Pasar dan Respon Warga

Tahun 2015 pasar (bisnis ritel Indomaret) mulai tertarik untuk mengembangkan sayap bisnisnya di Arjowilangun. Upaya melengkapi berkas sebagaimana yang disyaratkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (Dinas Perizinan) mulai dipersiapkan oleh pasar. Pasar memilih menggunakan pola *franchise* untuk mengembangkan bisnisnya di desa ini.

Bertepatan pula, pemerintah Kabupaten Malang, dalam pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang menyaratkan prioritas pemegang investasi adalah pelaku usaha yang berdomisili di wilayah yang dipilih oleh pasar. Di tengah banyaknya penolakan terhadap pasar, pasal ini menjadi pintu penolong bagi pasar agar mudah beradaptasi sehingga diterima di warga. Tujuan pemerintah sendiri, melalui pasal ini adalah menempatkan warga tetap bisa menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri (Busilan, 2016). Selain itu menurut Lukito, 2016, pasal tersebut dapat mengurangi kecemburuan sosial toko-toko kecil di wilayah pasar yang akan didirikan. Meskipun, secara operasional pasar yang mengambil alih aktivitas perekonomian, akan tetapi minimal warga masih menjadi bagian dari bisnis tersebut, meskipun dalam porsi yang sangat kecil. Sebagaimana yang dibayangkan pemerintah dari hadirnya pasar dalam proses perekonomian desa, dapat merangsang dan memunculkan aktivitas-aktivitas ekonomi baru, dan juga sebagai media tempat warga desa memasarkan produk UMKM-nya “menitipkan produk di pasar” (Lukito, 2016; Widiarti,

² Keterangan Wasis, pemilik Toko Anggara, 2016

2016). Meskipun, menurut Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM, para pelaku UMKM lebih memilih memasarkan hasil produk nya sendiri melalui pameran atau pemasaran langsung, daripada menitipkan ke toko modern (Widianti, 2016).

Bagi warga yang memiliki kemampuan secara ekonomi, tentu ini menjadi peluang untuk menambah kekayaan mereka, tanpa harus mengeluarkan keringat. Cukup duduk diam menunggu uang sewa dari pasar. Dari sinilah perpaduan kerja sama pasar dan warga dimulai.

Warga Arjowilangun yang bersedia di sewa oleh pasar adalah seorang usahawan yang memiliki usaha rumah makan dan mebel di Cirebon yang kebetulan memiliki tanah di desa yang dinilai tidak produktif. Di atas tanah seluas 20x60 meter ini berdiri sebuah rumah lama yang masih dihuni oleh bibi pengusaha yang usianya sudah lebih dari 60 tahun. Di samping kiri dan kanan berdiri dan berjejer toko-toko ritel milik warga Desa Arjowilangun, salah satu nya berdiri toko ritel yang tergolong modern milik mantan TKI, yaitu Toko Alfahri. Sebelum pasar akhirnya bekerjasama dengan usahawan yang dulunya bagian dari warga Desa Arjowilangun, pasar melakukan *lobbying* kepada pemilik Alfahri untuk *joint bussines*, pasar sebagai pengelola toko ritel Alfahri, dengan perjanjian bagi hasil dan sebagainya. Namun, *lobbying* tidak membuahkan hasil. Pemilik Toko Alfahri tidak bersedia di-*stir* (dikendalikan) oleh pasar.

Gagalnya *lobbying* membawa pasar pada salah satu anggota keluarga kaya di desa tersebut. Proses melengkapi syarat perizinan mulai berjalan, pasar dan warga melakukan tugas masing-masing. Karena Jiyono tidak domisili di Arjowilangun, sehingga proses pengurusan izin dilimpahkan kepada adiknya yaitu Bapak Puji. Bapak Puji bersama ketua RT 14 berusaha untuk mendatangi rumah setiap rumah di sekitar tanah itu berdiri untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan warga. Pengumpulan tanda tangan ini dilakukan selain untuk memenuhi syarat perijinan Dinas Perizinan dan untuk penguat posisi, karena di tengah memenuhi kelengkapan berkas, di sisi

lain warga desa yang mengatasnamakan pelaku usaha toko kelontong menolak rencana kehadiran pasar. Pasar dinilai akan mengganggu³ proses perekonomian Desa Arjowilangun, karena strategi bisnis pasar seperti promo produk, *discount*, akan mematikan usaha warga Desa Arjowilangun yang selama ini menggantungkan hidupnya di aktivitas pertokoan ritel mereka. Ditambah tertanam di pikiran warga pada umumnya, orang akan bangga dan menjadi terhormat ketika keluar membawa kantong belanjaan bertuliskan “Indomaret”, meskipun produk yang dibeli juga tersedia di toko ritel milik warga desa. *Image* “wah” telah terbangun.

Warga yang merasa terancam bisnisnya mulai menambah keanggotaan, mulai dari sesama pelaku usaha ritel desa, sampai mencari dukungan ke tokoh-tokoh desa, dan kepala desa. Kesadaran ancaman dimulai dari anak laki-laki pemilik Toko Bu Klumpuk. Martono menilai pasar yang dilengkapi dengan *discount* produk dan berbagai fasilitas toko yang lengkap seperti tersedianya ATM Bank, dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC), akan membuat warga Arjowilangun yang biasanya berbelanja di toko ritel milik warga desa akan lari ke toko ritel milik pasar. Kegelisahan pribadi ini pada akhirnya menjadi isu publik di desa tersebut. Martono berusaha melakukan *lobbying* kepada Kepala Desa agar berpihak kepada warga yang dipimpin. Setelah memperoleh dukungan dari kepala desa, Martono bersama teman-teman pemuda mulai bergerilya mengumpulkan dukungan warga lain yang terwujud pada goresan tinta tanda tangan di atas lembar serkiler⁴. Singkat cerita, warga berhasil menggagalkan pasar masuk ke desa

³ Hasil kajian I Wayan Adnyana menunjukkan minimarket sebagai aktor pasar berdampak pada marginalisasi retail kecil. Marginalisasi berlangsung pada sisi ekonomi, jaringan bisnis, teknologi, manajemen, dan sosial-politik. Lebih detail lihat pada I Wayan Adnyana, *Marginalization of Small Retailers As A Consequence Of The Growth of Minimarket in Denpasar City, 2013*, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ecs/article/view/6330>.

⁴ Di Desa Arjowilangun Serkiler dimaknai sebagai lembaran kertas yang diperuntukkan untuk mengumpulkan tanda tangan. Namun beberapa sumber di internet, serkiler berarti secara spontan dan sukarela.

Arjowilangun. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peran kepala desa yang secara sembunyi-sembunyi melalui telepon seluler memberikan arahan strategi penolakan kepada teman-teman pemuda Dusun Barisan. Peran kepala desa berlangsung secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk tidak menimbulkan perpecahan di antara warga Desa Arjowilangun. Meskipun demikian, bukan berarti semua warga desa pemilik toko ritel menolak kehadiran pasar, ada justru yang menerimanya. Mereka yang menerima pasar beranggapan kehadiran pasar akan membawa Desa Arjowilangun menjadi desa yang semakin “rejo”, maju⁵. Bahkan penilaian sinis dari warga juga muncul dengan ungkapan “*Lo atune wong Barisan iku goblok, wong desa rejo kok gak oleh, kapan majune desa yen gak oleh*”⁶.

Warga pemilik toko ritel di Desa Arjowilangun memiliki latar belakang yang cukup menarik. Ada sebagian pemilik toko ritel sebelum memutuskan untuk berwirausaha di desa, pernah melancong ke negara tetangga menjadi buruh migran. Sebagaimana sudah disebut dalam di atas, mereka memanfaatkan modal ekonomi yang diperoleh untuk memulai usaha pertokoan ritel, dan berbagai jenis usaha yang lainnya, mulai dari ternak kuda, ternak ayam petelur, mebel, dan sebagainya. Warga lokal pemilik toko ritel dari latar belakang ini tidak memperlumahkan kehadiran pasar. Pengalaman bersentuhan dengan dunia global, mengarahkan pada sikap memahami kehadiran pasar sebagai sebuah kompetisi bisnis, mendorong mereka lebih kompetitif dalam menjalankan usahanya.

Namun, atas nama solidaritas sesama pelaku usaha ritel kecil di desa, penolakan terhadap pasar menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan bersama. Strategi ini diperkuat dengan membangun opini publik dengan mendengarkan wacana: “identitas sosial

sebagai syarat membangun ekonomi desa”. Karena di pihak pasar berupaya beradaptasi dengan lingkungan melalui pemberian berbagai tawaran menarik, guna menarik simpati warga, salah satunya pola *franchise*. Sebagaimana dikhawatirkan oleh Marcuse, kapitalisme telah mencapai langkah yang paling bahaya atas nasib warga, yaitu lebih lanjut menurut Marcuse langkah itu adalah perkembangan kapitalisme terakhir yang menginvasi memori dan visi individu (Situmorang, 2013).

Kegaduhan di masyarakat mendorong pemerintah desa melalui arahan kepala dusun melakukan survei terhadap warga Desa Arjowilangun, khususnya di Dusun Barisan. Dari survei yang dilakukan 80% menolak kehadiran pasar. Kepala Dusun bersama ketua tokoh pemuda Karang Taruna Mertawijaya yang dalam kasus ini mengklaim bahwa melepas jaket karang taruna, bersama-sama mengawal klaim penolakan terhadap pasar. Sedangkan, ada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berada pada posisi mendukung kehadiran pasar, karena sebelumnya Pujiono bersama pasar bersilaturahmi ke salah satu rumah anggota DPD. Tiga bulan setelah rencana pasar masuk, mereka masih intensif menghubungi BPD untuk mengetahui perkembangan di elit desa, terutama kepala desa.

Pada waktu yang hampir bersamaan, pasar bersama warga yang tanahnya disewa dan ketua RT, mencoba mencari dukungan dari warga sekitar dengan memberikan imbalan Rp 100.000,00 per orang. Sedangkan total uang yang dibagikan sekitar Rp 2.000.000,00. Proses suap juga dilakukan oleh pasar kepada warga yang dicurigai dan dinamai sebagai provokator penolakan pasar. Akan tetapi, suap gagal dilakukan⁷. Meskipun demikian, pemerintah kabupaten tidak pernah masuk laporan ke kepolisian ataupun ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

⁵ Wawancara dengan Saring, Ketua RT 14 RW 2 Dusun Barisan, tanggal 8 Oktober 2016; Wawancara dengan Wonten, istri ketua RT 14 RW 2 Dusun Barisan, tanggal 08 Oktober 2016

⁶ Wawancara dengan Saring, Ketua RT 14 RW 2 Dusun Barisan, tanggal 8 Oktober 2016

⁷ Wawancara dengan Puji, Pemilik toko ritel di desa dan saudara kandung pemilik tanah yang akan disewa Indomaret, tanggal 20 Oktober 2016; Wawancara dengan Purwanto Korin, Pemilik Toko Sembako, tanggal 20 Oktober 2016

Malang terkait pemalsuan tanda tangan dukungan Indomaret dan sejenisnya⁸. Warga seakan bungkam dengan praktik suap yang terjadi di dalam tubuh warga, justru warga menikmatinya.

Di sisi lain, sikap pemerintah acuh terhadap cara yang dipilih pengusaha untuk *ngeneng-ngeneng*⁹ warga supaya mau tanda tangan. Apakah mau memakai uang atau kekerasan, itu urusan pengusaha, pemerintah tidak mau ambil tahu. Sepanjang dilakukan survei di lapangan tidak ada pemalsuan tanda tangan, maka izin bisa diproses¹⁰.

Intervensi pasar terlihat mengungkung dan membentuk cara berpikir pemerintah. Di Kabupaten Malang pernah ada desakan untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan izin pendirian ritel Indomaret maupun Alfamart di Kabupaten Malang. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Malang bersikap tidak bisa mengeluarkan kebijakan pembatasan. Untuk meredam gejolak penolakan di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Malang menyiasatinya dengan pengaturan jarak melalui peraturan daerah, karena pemerintah daerah merasa posisinya akan terancam jika menghalangi bisnis. Tuduhan, menghambat iklim investasi akan dibebankan kepada pemerintah daerah apabila melakukan upaya paksa yakni membatasi izin pasar semi modern¹¹. Padahal, yang diminta oleh pedagang tradisional adalah kebijakan moratorium¹².

⁸ Wawancara dengan Lukito, Komisi B DPRD Kabupaten Malang, tanggal 8 Oktober 2016

⁹ *Ngeneng-ngeneng* adalah istilah bahasa Jawa yang berarti upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk membujuk seseorang dengan tujuan agar seseorang atau kelompok tersebut bersedia mengikuti kemauannya. Dari hasil penelitian, upaya membujuk dilakukan dengan menghalalkan segala macam cara, termasuk kekerasan atau pemberian uang suap.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Anjar Bagian Ekonomi Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Malang, tanggal 29 September 2016

¹¹ Kutipan Wawancara Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Susianto, dalam Jabal Tarik Ibrahim dan Hutri Agustino, Konsep Penataan Kawasan Usaha Ritel di Tengah Pemukiman Masyarakat Pedesaan, Jurnal AGRISE, Volume XI No. 3 Bulan Agustus 2011, hlm. 186

¹² Pedagang Tradisional Minta Moratorium Pendirian Toko Modern, dalam <https://m.tempo.co/read/news/2011/03/25/090322791/pedagang-tradisional-minta->

Terkungkungnya pemerintah juga dibaca oleh Asyari Usman mantan wartawan senior BBC London dalam tulisan opininya yang terbit di Harian Analisa Daily tanggal 07 Januari 2015 dengan judul Peritel Besar Ancam “Kedai Sampah”. Menurutnya, kehadiran peritel besar dengan modal yang juga besar, modal raksasa begitu dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Mereka dianggap akan menjadi stimulus perekonomian lokal menjadi semarak. Oleh karenanya, regulasi pembatasan gerak mereka tidak hadir dalam kebijakan pemerintah daerah absen. Asyari Usman juga mempertanyakan mengapa pemerintah dan/atau DPR tidak begitu peduli terhadap aspek negatif dari perluasan jaringan ritel modern yang saat ini diwakili oleh Indomaret dan Alfamart¹³.

Intervensi pasar diandaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang, akan terjadi proses perpindahan surplus ekonomi nasional ke lokal. Cara pandang pemerintah Kabupaten Malang tidak jauh beda dengan perjalanan pembangunan Indonesia di tahun-tahun sebelumnya, Rex Mortimer, pada tahun 1970 sebagaimana dikutip Vedi Hadis dalam bukunya, Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto mendalami dalam pembangunan ekonomi, Negara Indonesia selalu berperan sebagai komprador, yakni berperan menjadi bagian subordinasi bagi kepentingan-kepentingan modal internasional, dengan menjalankan peran utama menciptakan syarat-syarat bagi pemindahan surplus ekonomi ke negeri-negeri metropolitan¹⁴.

moratorium-pendirian-toko-modern, edisi Jum'at, 25 Maret 2011 | 11:16 WIB

¹³ Lebih detail lihat pada <http://harian.analisadaily.com/opini/news/peritel-besar-ancam-kedai-sampah2/96258/2015/01/07>

¹⁴ Vedi R. Hadiz, (ed) Rahadi T Wiratama, Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto, Jakarta: LP3ES Indonesia, 2005, hlm. 175

Menggaungkan Wacana Berbasis Identitas: Langkah Minimalisasi Ruang Intervensi Pasar

Selama ini, intervensi pasar sangat dinantikan untuk mempercepat pembangunan di sebuah wilayah tertinggal. Namun cerita Desa Arjowilangun menjelaskan lain. Intervensi pasar dinilai sebagai sesuatu yang justru akan mengganggu. Hal ini terlihat dari munculnya penolakan terhadap pasar tersebut. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi sikap warga desa di Desa Arjowilangun menutup diri dari intervensi pasar seperti kemampuan modal ekonomi yang kuat yang paling banyak berasal dari pundi-pundi ekonomi dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) membuat warga semakin percaya diri untuk membangun perekonomian dengan cara dan kekuatannya sendiri. Mereka mampu memutar modal dari luar negeri menjadi usaha-usaha yang mampu membuka lapangan pekerjaan. Ditambah dengan adanya Koperasi Senang Hati (didirikan oleh TKI) mampu memberikan pinjaman kepada warga Desa Arjowilangun yang hendak membuka usaha. Bunga yang dibebankan kepada warga sangat kecil. Dalam perkembangannya koperasi ini tidak hanya memberikan pinjaman kepada anggota dengan pekerjaan TKI tetapi telah dibuka untuk warga Desa Arjowilangun secara umum.

Kemampuan ekonomi warga desa yang dirasa sudah kuat dan pengalaman traumatis atas pengalaman atas keterpurukan ekonomi yang pernah melanda Arjowilangun mendorong mereka bersepakat (kesepakatan secara tidak tertulis) untuk tidak memberikan izin menetap aktivitas usaha diluar yang dimiliki oleh warga Arjowilangun. Entah sejak kapan hal ini tertanam, tetapi dengan kemunculan Indomaret yang berniat untuk melakukan investasi di Desa Arjowilangun mendapatkan penolakan keras dan menggaungkan kembali kesepakatan ini sebagai wacana. Wacana ini ditujukan untuk mempengaruhi sikap politik pemerintah desa sebagai pemilik kekuasaan formal untuk tidak memberikan izin pendirian Indomaret di Arjowilangun.

Warga mengajukan wacana/artikulasi berupa wacana identitas tentang warga yang akan melakukan kerja sama usaha dengan Indomaret bukan warga yang memiliki KTP Desa Arjowilangun. Meskipun secara historis, ia adalah putra asli kelahiran Arjowilangun, memiliki tanah di Arjowilangun, yang karena menikah sehingga sekarang pindah secara administratif ke Cirebon.

Pemerintah desa dilema dengan wacana tentang intervensi pasar yang sudah menjadi arus utama dalam kebijakan politik dari nasional hingga daerah dan wacana identitas warga. Tidak menutup mata keberhasilan wacana identitas yang digaungkan tidak terlepas dari konteks sejarah perekonomian Desa Arjowilangun tahun 1970-an dan pengaruh kebaikan-kebaikan sosial-ekonomi yang telah ditanam warga desa yang bekerja menjadi TKI, yakni berupa pemberian sumbangan-sumbangan pembangunan untuk desa seperti penyemiran jalan, pemeliharaan poskamling, pemberian bus sekolah, menghidupkan budaya di Arjowilangun dan lapangan pekerjaan¹⁵.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengalaman bersentuhan dengan dunia global yang membawa transfer modal ekonomi dan ide telah memberikan modal yang kuat untuk warga desa percaya diri membangun perekonomian Desa Arjowilangun secara mandiri. Kemandirian itu diekspresikan dengan meminimalisasi ruang keterlibatan kekuatan ekonomi pasar di Desa Arjowilangun. Selain karena pengalaman bersentuhan dengan dunia global, kemandirian warga Desa Arjowilangun juga tidak terlepas dengan pengalaman traumatis keterpurukan ekonomi desa.

¹⁵Wawancara dengan Kuswianto Kepala Desa Arjowilangun, tanggal 22 Juli 2016; Wawancara dengan Winadi, BPD Arjowilangun, tanggal 20 Oktober 2016; Wawancara dengan Yono Kaur Desa Arjowilangun, tanggal 08 Oktober 2016

Sebagaimana pasar sebagai arus utama wacana pembangunan yang menghegemoni pemerintah, warga juga memandang perlu untuk menggaungkan wacana tandingan. Alhasil, wacana identitas menjadi senjata utama untuk membentuk ulang sikap pemerintah desa. Wacana identitas ini menguat juga karena pondasi yang telah warga desa bangun sebelumnya kepada pemerintah desa yakni menanam kebaikan-kebaikan sosial-ekonomi dalam pembangunan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih untuk pembimbing dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- . (2009). *Pemantauan Dampak Sosial-Ekonomi Krisis Keuangan Global Dampak terhadap Penghidupan Masyarakat yang bertumpu pada Tenaga Kerja Migran*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU Research Institute.
- . (2011). *News.detik.com*, 24 Juni 2011. Arjowilangun Desa Termodern Sebagai Kantong TKI. Diakses dari <http://news.detik.com/jawatimur/1667905/arjowilangun-desa-termodern-sebagai-kantong-tki>
- . (2015). *Malangpost.net*, 25 Mei 2015. Mengunjungi “Desa TKI” di Kalipare. Diakses dari <http://malangpost.net/lapsus/mengunjungi-desa-tki-di-kalipare>
<http://disperindag.malangkab.go.id>
- Adnyana, I. W. (2013). Marginalization of Small Retailers as a Consequence of the Growth of Minimarket in Denpasar City. *E-journal of Cultural Studies*, 6 (2), 1-5.
- Agustino, J. T. (2011). Konsep Penataan Kawasan Usaha Ritel di Tengah Pemukiman Masyarakat Pedesaan. *Jurnal AGRISE*, XI (3).
- Ananta, D. D. (2014). *Indoprogress*, 21 Februari 2014. Merebut Hak Atas Kota: Catatan Perlawanan Pegiat Usaha Stasiun Pos Duri. Diakses dari <https://indoprogress.com/2014/02/merebut-hak-atas-kota/>
- Asyhad, M. H. (2013). Menengok Kampung TKI di Malang. *Intisari-online.com*, 21 Oktober 2013. Diakses dari <http://intisari-online.com/Travelling/Travel/Menengok-Kampung-Tki-Di-Malang>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approach* (Second Edition). London: Sage Publications.
- Fadjar, N. M. (2009). Neoliberalisme dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Transisi*, 5.
- Hadiz, V. R. (2005). *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. R. T. Wiratama, Ed. Jakarta: LP3ES Indonesia.
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Methmann, C. P. (2010). ‘Climate Protection’ as Empty Signifier: A Discourse Theoretical Perspective on Climate Mainstreaming in World Politics. *Millennium*, 39 (2), 345–372.
- Musyaddad, A. (2003). Kapitalisme Indonesia: Langkah-langkah Tanpa Peta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7 (1).
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Purnomo, A. (2011). *Tempo.co*, 25 Maret 2011. Pedagang Tradisional Minta Moratorium Pendirian Toko Modern. Diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2011/03/25/090322791/pedagang-tradisional-minta-moratorium-pendirian-toko-modern>
- Satria, A., Rustiadi, E., & Purnomo, A. M. (2011). *Menuju Desa 2030*. Bogor: Crestpent Press.

- Savirani, A. (2017). Pertempuran Makna "Publik" dalam Wacana Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. *Prisma*, 36 (1), 112-126.
- Situmorang, A. W. (2013). *Gerakan Sosial: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soedjais, Z. (2003). Good Governance, Daya Saing dan Investasi Global. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6 (3), 311.
- Soetrisno, L. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Usman, A. (2015). *Harian Analisa Daily*, 7 Januari 2015. Peritel Besar Ancam "Kedai Sampah" (2). Diakses dari <http://harian.analisadaily.com/opini/news/peritel-besar-ancam-kedai-sampah2/96258/2015/01/07>
- Winanti, P. S. (2011). *Melacak Asal-Usul Neoliberalisme*. Diakses dari <http://poppysw.staff.ugm.ac.id/posts/articles/melacak-asalusul-neoliberalisme>
- Winarno, B. (2013). *Etika Pembangunan*. Jakarta: Caps Publishing.